

## Penerimaan publik dalam keberhasilan mitigasi bencana Covid-19 di Kota Samarinda

Fajar Apriani<sup>1\*</sup>, Ahmad Luthfi<sup>2</sup>, Bayu Febrianto<sup>3</sup>, Junaidy<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Merdeka Malang, Indonesia.

\*) Korespondensi: yaniefajar@yahoo.com

### Abstract

*The Covid-19 pandemic as a non-natural disaster needs to be faced with responsiveness integrated disaster management that emphasized adaptability, collaboration and teamwork. This article analyzes public acceptance as a form of disaster response that can determine the success of the governance in implement disaster management through survey method. The research subjects are the people of the Samarinda City who became respondents randomly. Data was collected using online questionnaire that had been reliable tested. The result of the study find that the success of non-natural disaster mitigation does not always depend on cross-sectoral efforts between the government and stakeholders, but also depends heavily on the acceptability of policy targets. So it's getting higher public acceptance of government policies, the chance of the implementation of the Covid-19 disaster mitigation success will be higher too. Because the management disasters in developing countries face great challenges from diversity characteristics of society that shape their acceptance of the policy*

#### Article History:

Received: 4/6/2021

Revised: 09/10/2022

Accepted: 21/10/2022

Published: 24/10/2022

**Keyword:** *disaster management; mitigation; public acceptability; policy effectiveness; pandemic; Covid-19.*

## Abstrak

Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam perlu dihadapi dengan tanggap bencana yang terintegrasi yang menekankan pada adaptabilitas, kolaborasi dan kerjasama tim. Artikel ini menganalisis penerimaan publik sebagai bentuk ketanggapan bencana yang dapat menentukan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan manajemen bencana melalui metode survei. Subyek penelitian adalah masyarakat Kota Samarinda yang menjadi responden secara acak. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner daring yang telah diuji reliabilitasnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan mitigasi bencana non alam tidak selalu bergantung pada upaya lintas sektoral antara pemerintah dan swasta saja, tetapi juga sangat bergantung pada penerimaan sasaran kebijakan. Sehingga semakin tinggi penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah, maka semakin tinggi peluang keberhasilan mitigasi bencana Covid-19 yang dilaksanakan, sebab manajemen bencana di negara berkembang menghadapi tantangan besar dari keragaman karakteristik masyarakat yang membentuk penerimaannya terhadap kebijakan.

**Kata Kunci:** Manajemen Bencana, Mitigasi, Penerimaan Publik, Efektivitas Kebijakan, Pandemi, Covid-19

### 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk bencana non alam, yang menjadi kasus krisis secara bersamaan. Manajemen bencana dikatakan Bly dkk (2020) meliputi empat pilar manajemen kedaruratan: perencanaan dan persiapan, mitigasi, respon, dan pemulihan. Situasi darurat merupakan kondisi penting dalam penanganan kesehatan, kehidupan dan tempat tinggal yang dapat dikelola dengan kapabilitas organisasi-organisasi yang terkait.

Dikatakan lebih lanjut oleh Bly dkk (2020) bahwa bencana di sisi lain merupakan situasi darurat yang sangat kompleks, yang membutuhkan banyak sumberdaya yang tidak dapat tersedia dengan segera. Maka manajemen bencana mengacu pada sejumlah prinsip dari manajemen kedaruratan dan menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi dan kerjasama tim. Terbatasnya sumberdaya akan memberikan tantangan bagi pemerintah dan organisasi-organisasi secara sekaligus

pada efek dari bencana, juga pada kemampuan untuk mengatasinya.

Berdasarkan laporan yang disajikan oleh negara-negara anggota *Asian Disaster Reduction Center (ADRC)*, terdapat tiga praktek tanggap bencana yang berkembang selama pandemi Covid-19, antara lain: (1) Digitalisasi beberapa aspek tanggap bencana termasuk peringatan dini, pengawasan dan penilaian dampak, (2) Evakuasi yang tersebar untuk menegakkan jarak sosial, termasuk tindakan lain seperti pengujian, pelacakan dan isolasi individu yang terinfeksi, dan (3) Pertolongan pertama psikologis jarak jauh kepada individu yang terkena dampak bencana yang sudah mengalami kecemasan akibat pandemi (Potutan dan Arakida, 2021). Artikel ini berupaya mengkaji penerimaan publik terhadap kebijakan protokol kesehatan yang diberlakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda, ketika banyak negara lain yang telah menerapkan praktek-praktek tanggap

bencana yang terintegrasi dalam langkah-langkah baru dan terlatih.

Hasil penelitian ini diyakini dapat menghasilkan deskripsi tentang penerimaan publik terhadap kebijakan protokol kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda di masa pandemi Covid-19 sebagai salah satu obyek studi kasus efektivitas kebijakan mitigasi bencana non alam yang terjadi di negara berkembang, sebagaimana dinyatakan oleh Quarantelli (1988) bahwa negara-negara sedang berkembang merupakan subyek yang dapat berulang-ulang mengalami dampak bencana berupa berkurangnya atau terhambatnya pembangunan. Kerentanan negara berkembang dalam menghadapi bencana alam maupun non alam, menjadi salah satu latar belakang mengapa penting untuk mengkaji karakteristik masyarakat di negara berkembang dalam menghadapi bencana, terutama di daerah.

Sebagai tambahan, ketika sejumlah hasil-hasil penelitian menemukan bahwa ketangguhan dapat mengalahkan bencana bergantung pada kemampuan adaptasi organisasi-organisasi penanganan bencana (Kusumasari dan Alam, 2011; Bly dkk, 2020; dan La dkk, 2020), maka penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan organisasi (terutama pemerintah) dalam menghadapi bencana lebih bergantung pada penerimaan dan dukungan publik terhadap kebijakan mitigasi bencana yang diberlakukan.

Kota Samarinda menjadi salah satu kota di wilayah Kalimantan Timur yang mengalami penularan Covid-19 dalam status resiko tinggi atau level merah sejak Agustus 2020 dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif berjumlah 649 jiwa, sedangkan perkembangan kasusnya hingga akhir penelitian ini dilakukan pada akhir

Juli 2021 telah mencapai jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 19.166 jiwa (<https://covid19.kaltimprov.go.id>). Sejak 7 September 2020, Pemerintah Kota Samarinda memberlakukan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Samarinda.

Telah banyak sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda mengenai kebijakan tersebut, diantaranya melalui pemanfaatan berbagai media. Aplikasi penegakan hukumnya di lapangan, berangkat dari pemberian himbauan, sanksi sosial hingga pada penerapan sanksi sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Perwali, mulai dari sanksi administratif maupun denda, namun tetap ditemukan tingginya tingkat ketidakpatuhan publik atas kebijakan tersebut hingga kini.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian bagaimana penerimaan publik terhadap kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang diberlakukan Pemerintah Kota Samarinda dan bagaimana dampaknya terhadap keberhasilan mitigasi bencana yang dilakukan. Penelitian ini akan dapat memberikan deskripsi tentang karakteristik masyarakat Kota Samarinda dalam ketanggapan terhadap bencana Covid-19 yang akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan manajemen bencana. Disamping dapat memberikan implikasi praktis bagi pelaksana kebijakan mitigasi bencana Covid-19 di Kota Samarinda sebab hasil penelitian ini menjadi salah

satu sumber informasi mengenai dukungan atau penolakan masyarakat Kota Samarinda terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Bencana dan kedaruratan berbeda dalam kualitas dan besarnya, tetapi seringkali dan secara tidak akurat dimaknai bermakna sama (Tierney, 2007). Kedaruratan memiliki waktu yang sensitif, juga memiliki potensi bahaya yang meletakkan kehidupan dan manusia dalam resiko. Sumberdaya tersedia di level daerah untuk mencegah, menangani, atau meminimalisir bahayanya, dan memerlukan respon dari organisasi yang dapat bertanggungjawab (Oliver, 2010; United Nations, 2019).

Sedangkan bencana, kadangkala dipertimbangkan sebagai “kedaruratan yang sangat kompleks” atau “kedaruratan besar” yang melibatkan banyak orang dalam resiko bahaya, banyak kewenangan untuk menanggapinya, dan sumberdaya yang tidak dapat disediakan dengan cepat di daerah (Oliver, 2010). Lebih lanjut Oliver (2010) menyatakan bahwa koordinasi antar agen, yang sebelumnya banyak tidak punya hubungan, berubah menjadi tantangan dalam penanganan bencana.

Maka dari itu, penanganan bencana merupakan upaya mengatasi situasi darurat yang sangat kompleks, yang memerlukan banyak sumberdaya yang tidak dapat kesemuanya tersedia dengan segera. Manajemen bencana perlu mengacu pada sejumlah prinsip (Bly dkk, 2020) yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi dan kerjasama tim yang terjalin antar organisasi maupun lintas sektoral. Keterbatasan sumberdaya (terutama di daerah) pada waktu menangani situasi

darurat saat terjadinya bencana maupun pada saat panjangnya periode peristiwa bencana sehingga memunculkan kewalahan, merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dan jajarannya yang menuntut kemampuan tinggi dalam mengatasinya. Bly dkk (2020) menyatakan manajemen bencana bersifat kompleks dan krusial.

Sistem penanganan bencana dikatakan oleh Hufschmidt (2011) jika semakin tangguh maka semakin banyak bahaya yang dapat diserap sebelum sistem mengatasinya. Ia juga mengatakan bahwa ketangguhan mengubah ambang bencana. Maka dengan kata lain, semakin tangguh sistem penanganan bencana yang dilakukan berarti semakin rendah tingkat kerawanan suatu bencana.

Dari 14 negara dalam unit analisis penelitian Potutan dan Arakida (2021) mengenai ketanggapan terhadap Covid-19, Indonesia merupakan satu dari lima negara (New Zealand, Samoa, Tonga dan Vanuatu) yang menunjukkan sistem penanganan Covid-19 dan tanggap bencana terpadu, yang dipimpin oleh lembaga *Disaster Risk Management (DRM)* - seperti Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) atau *the National Management Agency*, Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun Daerah. DRM mengkoordinasikan semua langkah-langkah ketanggapan untuk krisis secara kontinyu dan diyakini dapat meminimalkan kemacetan koordinasi intra-pemerintahan. *Center for Risk Management & Sustainability/CRMS* dalam Baskoro (2021) menyatakan sebagai suatu sistem pengelolaan resiko berbasis bencana, praktisi DRM melihat bencana berdasarkan sudut pandang resiko yang memperhatikan pengurangan potensi

kerugian (jiwa dan asset) serta memastikan keselamatan, kesehatan dan komunitas yang produktif.

Sementara lima negara (Kamboja, Fiji, Papua Nugini, Filipina dan Singapura) menggunakan agensi kesehatan seperti Kementerian Kesehatan sebagai pemimpin ketanggapan bencana dan empat negara lainnya (Jepang, Myanmar, Republik Korea dan Vietnam) menggunakan *task force* pemerintahan dimana ketanggapan bencana dipimpin oleh Presiden atau Perdana Menteri secara langsung (Potutan dan Arakida, 2021).

Namun demikian, tidak hanya bagi agen-agen pemerintah, penanganan bencana juga memiliki unsur penting dari kemampuan masyarakat untuk beradaptasi pada kondisi bencana itu. Dalam bencana pandemi Covid-19, kesiapan dan kemampuan adaptabilitas masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan penanganan bencana. Kesiapan dan kemampuan publik beradaptasi dengan kondisi bencana merupakan bagian dari penerimaan publik terhadap suatu kebijakan. Penerimaan publik terhadap kebijakan menurut Sekhon dkk (2017) merujuk pada bagaimana perasaan dan pemikiran individu tentang implementasi atau kelanjutan dari kebijakan.

Kollek (2013) menyatakan bahwa persepsi atas kesiapan menghadapi bencana seringkali cukup berbeda antara perencana dan pekerja garda depan. Dimana *Health Standards Organization* (2020) menyatakan tekanan dan masalah dari operasi setiap hari dapat dengan mudahnya meminggirkan kekhawatiran untuk hal-hal yang tidak terduga. Perilaku dari persiapan menghadapi bencana perlu meliputi segala aspek dalam organisasi yang berhadapan

dengan hal-hal yang tidak bisa terlihat selain bahaya yang sesungguhnya.

Namun penelitian ini lebih memfokuskan diri untuk melihat penerimaan publik yang merupakan sasaran penanganan bencana dalam merespon kebijakan-kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang diberlakukan pemerintah, yang tidak kalah kompleksnya. Sebagaimana pendapat Cairney (2009); Smith (2013); Freudenberg (2014); Cullerton dkk (2016); Roache dan Gostin (2018) menyatakan penerimaan publik terhadap kebijakan semakin diakui memainkan peran penting dalam menentukan sejauhmana bukti implementasi kebijakan dapat berhasil.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif kuantitatif yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, yaitu penerimaan publik terhadap kebijakan mitigasi bencana Covid-19 di Kota Samarinda.

Rienstra dkk (1999) mengemukakan bahwa penerimaan publik dapat dikaji melalui berbagai jenis analisis. *Pertama*, akseptabilitas dapat diprediksi melalui model teoritis yang meyakinkan perilaku rasional individu. *Kedua*, melalui studi empiris yang dapat diterapkan dengan menetapkan kuesioner dan mewawancarai orang. *Ketiga*, melalui studi *ex-post* yang bisa dilakukan dengan menyelidiki perubahan perilaku individu melalui pengukuran terhadap cara perubahan perilaku sebagai indikasi dari penerimaan. Dari ketiga jenis analisis

pengukuran penerimaan publik tersebut, peneliti menggunakan studi empiris dengan penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

Dalam penyusunan kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa prosedur. Pertama, konstruksi alat ukur dari penerimaan publik terhadap suatu implementasi kebijakan, melalui *review* konstruk dari studi literatur yang mengacu pada berbagai artikel dalam jurnal maupun buku-buku referensi. Untuk variabel penerimaan publik, indikatornya merujuk pada teori Schade dan Teubel (1997) antara lain: persepsi individu, dan kepercayaan terhadap efektivitas dari penggunaan suatu sistem (Schade dan Schlag, 2001). Setiap indikator kemudian dituangkan dalam beberapa bentuk pertanyaan.

Kedua, konstruksi skala yang digunakan untuk menentukan kategori respon responden terhadap pertanyaan yang telah dilakukan melalui penskalaan. Penskalaan menggunakan model skala Likert dengan tiga jenjang nilai yaitu Yakin/Percaya/Mendukung, Ragu-ragu/Mungkin, Tidak Yakin/Tidak Percaya/Tidak Mendukung.

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2020 yang tersebar di sepuluh kecamatan, dengan jumlah 827.994 jiwa. Sedangkan sampel penelitian ditentukan secara acak berdasarkan kesediaan masyarakat Kota Samarinda untuk menjadi responden penelitian pada saat kuesioner daring sebagai instrumen penelitian dibagikan melalui penggunaan *google form* selama 2

minggu. Kuesioner telah dinyatakan reliabel dengan nilai hasil uji Cronbach's Alpha sebesar 0,819 yang diujikan pada 25 sampel. Terhimpun sebanyak 193 orang responden dengan berbagai karakteristik. Status masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini, baik laki-laki/perempuan, dengan usia minimal 17 tahun melalui pertimbangan telah mampu memiliki persepsi individu atas suatu kebijakan pemerintah, yang sudah menikah, tidak/belum menikah, bercerai, bekerja di berbagai sektor, formal maupun informal, dengan beragam tingkat pendidikan.

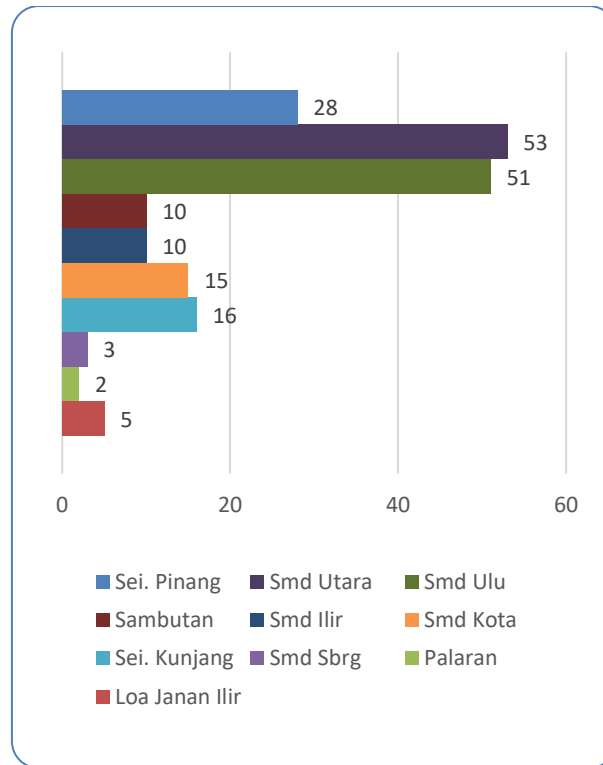
Data dianalisis secara kuantitatif dengan mempergunakan statistik deskriptif

melalui penyajian grafik dari perolehan data hasil survei yang telah diolah, yang disertai narasi atau deskripsi atas makna data yang telah terkumpul.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini merupakan masyarakat Kota Samarinda yang berasal dari seluruh kecamatan di Kota Samarinda, namun mayoritas merupakan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Samarinda Utara (27,5 persen) dan Kecamatan Samarinda Ulu (26,4 persen). Wilayah Kecamatan Samarinda Utara merupakan wilayah yang terletak menuju perbatasan kota antara Samarinda - Bontang. Sedangkan wilayah Kecamatan Samarinda Ulu termasuk wilayah tengah kota dari Kota Samarinda.

**Grafik 1. Responden Penelitian Berdasarkan Wilayah Kecamatan**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021*

Responden penelitian pada umumnya berjenis kelamin perempuan (68,4 persen), berusia antara 17-22 tahun (34,7 persen), berpendidikan terakhir pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma 4 (38,9 persen), memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa (42,5 persen), dengan status perkawinan yang berimbang antara telah menikah dan belum menikah (masing-masing 48,7 persen).

Karakteristik responden yang terhimpun melalui pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner daring sesuai dengan identifikasi masalah yang terjaring di awal bahwasanya masyarakat dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang berusia di antara 17-22 tahun merupakan kelompok masyarakat yang seringkali

melanggar protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid-19.

### **1. Persepsi Publik Kota Samarinda terhadap Covid-19 sebagai Masalah Publik**

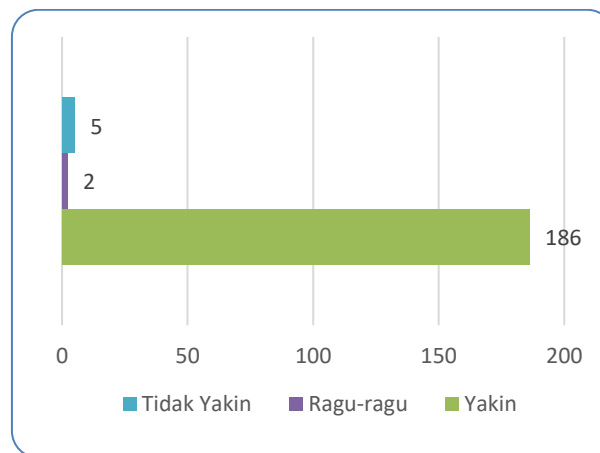
Penerimaan publik terhadap suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, secara mendasar harus diawali dengan melihat bagaimana pengakuan publik pada permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana Schlag dan Teubel (1997) menyatakan bahwa persepsi individu terhadap masalah menghasilkan kesadaran memilih untuk mengontrol masalah dan melakukan evaluasi.

Dalam kaitannya dengan mitigasi bencana Covid-19, masyarakat harus mengakui atau meyakini bahwa Covid-19 riil dan merupakan masalah publik sebab mempengaruhi kehidupan masyarakat. Schade dan Schlag (2001) menyatakan bahwa persepsi terhadap masalah dapat mempengaruhi dukungan atau penolakan terhadap langkah-langkah kebijakan. Sehingga dalam konteks kebencanaan, dapat dipahami apabila masyarakat menyadari keberadaan suatu masalah publik, maka persepsi masyarakat terhadap masalah itu akan dapat mempengaruhi

upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanganinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Steg dkk (2005); Vlassenroot dkk (2008) bahwa diperlukan penyamaan persepsi tentang sejauhmana suatu hal dianggap sebagai masalah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan terhadap solusi untuk pemecahan masalah.

Berikut ini disajikan hasil pengumpulan data tentang pengakuan masyarakat Kota Samarinda terhadap keberadaan Covid-19:

**Grafik 2. Keyakinan Masyarakat Kota Samarinda pada Keberadaan Covid-19**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

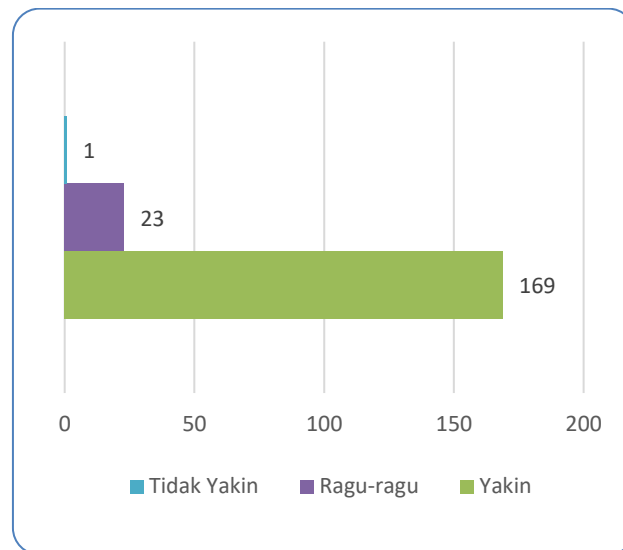
Pengumpulan data menunjukkan bahwa 96,4 persen masyarakat Kota Samarinda mempercayai bahwa Covid-19 itu ada atau merupakan suatu realita.

Jika masyarakat telah mengakui atau meyakini keberadaan masalah pada lingkungannya, maka berikutnya pola pikir masyarakat akan berlanjut pada upaya identifikasi terhadap ancaman yang dapat

ditimbulkan dari masalah tersebut, bahkan identifikasi dalam cara yang sederhana sekalipun. Maka dari itu, pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada responden penelitian adalah mengenai opini publik atas dampak buruk yang ditimbulkan Covid-19 bagi kehidupan masyarakat di Kota Samarinda, dengan hasil pengumpulan data yang disajikan sebagai berikut:



**Grafik 3. Opini Masyarakat Kota Samarinda tentang Dampak Buruk yang Ditimbulkan Covid-19 Bagi Kehidupan**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 87,6 persen masyarakat Kota Samarinda yakin bahwa Covid-19 membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.

Persepsi terhadap masalah dikatakan oleh Schade dan Schlag (2001) dapat mempengaruhi dukungan atau penolakan terhadap langkah-langkah kebijakan. Ini berlaku untuk persepsi dua aspek yang berbeda. Pada satu sisi diasumsikan bahwa orang-orang yang merasa terpengaruh secara pribadi oleh sebuah atau beberapa masalah atau ancaman, akan mendukung nilai-nilai kebijakan dalam mengatasi masalah individu. Asumsi ini didukung oleh teori motivasi perlindungan (Rogers, 1983) yang mendalilkan bahwa menjaga perilaku cepat akan lambat akan menyebabkan konsekuensi negatif yang parah bagi dirinya sendiri, yaitu ketika mereka merasa terpengaruh secara pribadi. Di sisi lain, terdapat bukti empiris bahwa evaluasi keadaan yang dirasakan sebagai

masalah sosial (yang disebut persepsi masalah umum) tanpa dipengaruhi secara pribadi oleh masalah dapat mengarah pada peningkatan dukungan untuk nilai-nilai kebijakan yang diambil dalam mengatasi masalah (Kals dalam Schade dan Schlag, 2001).

Apabila publik telah menyadari keberadaan masalah di sekitarnya dengan persepsi bahwa masalah itu membawa akibat atau dampak buruk, maka penerimaan publik terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik tersebut akan terbentuk. Sebagaimana dikatakan oleh Schade dan Schlag (2001) bahwa persepsi masalah yang tinggi dapat mengarah pada peningkatan berurusan dengan pilihan untuk memecahkan masalah yang dirasakan. Hal ini merupakan salah satu prasyarat untuk munculnya penerimaan publik (terhadap suatu kebijakan).

Maka, dengan persepsi publik yang mayoritas (96,4 persen) meyakini bahwa

Covid-19 itu memang ada dan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat (87,5 persen), maka terbentuk keyakinan publik bahwa masalah Covid-19 perlu ditangani, yang dalam hal ini tindakan penanganan itu dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai kebijakan mitigasi bencana. Hal ini menggiring masyarakat untuk kemudian memberikan dukungan atau penolakan terhadap upaya-upaya penanganan masalah Covid-19.

## **2. Kepercayaan Publik Kota Samarinda terhadap Penanganan Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah**

Kecenderungan yang terjadi pada kelompok masyarakat yang berada dalam ruang penerimaan, mereka akan menerima Covid-19 sebagai musibah dan mereka memiliki kesadaran bahwa virus tersebut dapat dihilangkan. Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah, mereka bisa menerima (Setiawan dalam Puspa, 2021).

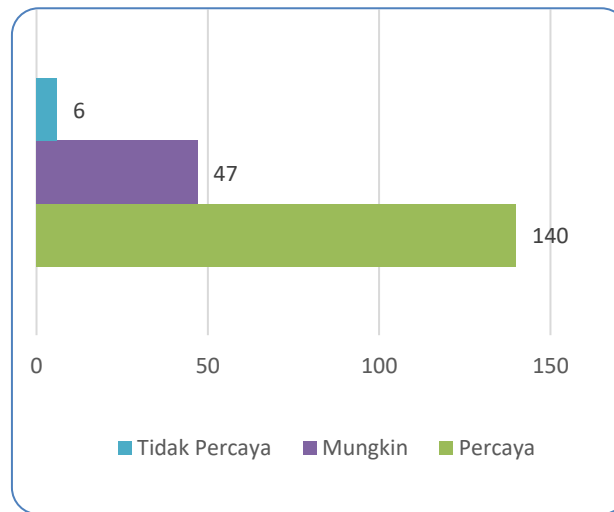
Penerimaan publik hanya dapat diharapkan jika seseorang memiliki kepercayaan terhadap efektivitas dari penggunaan suatu sistem (Schade dan Schlag, 2001). Maka dalam penelitian ini,

peneliti menghimpun jawaban responden mengenai rasa percaya publik atas sejumlah kebijakan-kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan yang diberlakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan operasional oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk wilayah kerjanya, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020.

Adapun data yang pertama disajikan terkait dengan kebijakan-kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda yaitu mengenai kepercayaan masyarakat Kota Samarinda terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah melalui penerapan protokol kesehatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Grafik 4. Kepercayaan Masyarakat Kota Samarinda bahwa Penyebaran Covid-19 Dapat Dicegah dengan Penerapan Protokol Kesehatan**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 72,5 persen masyarakat Kota Samarinda mempercayai bahwa dengan penerapan protokol kesehatan di dalam aktivitas sehari-hari, penyebaran Covid-19 dapat dicegah. Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dikenal dengan sebutan 5M, yang meliputi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Penerapan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 dilakukan tidak hanya di daerah, tetapi juga pada level nasional dan global. Namun demikian, sejak awal bahkan hingga kini setelah masa pandemi telah dijalani oleh seluruh manusia di dunia selama hampir dua tahun, kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi resistensi ataupun keberakhiran kepatuhan akibat kelalaian bahkan kejenuhan publik.

Untuk kondisi di Kota Samarinda, hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 72,5 persen publik

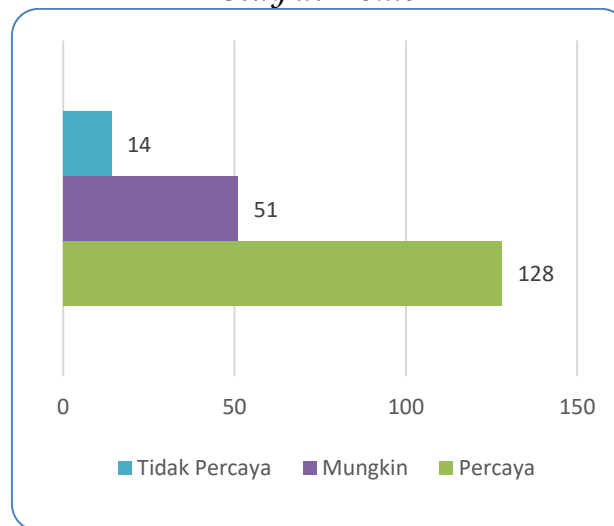
masih mematuhi karena masih percaya bahwa penerapan protokol kesehatan mampu mencegah penyebaran Covid-19, sementara 24,4 persen mulai meragukannya.

Mitigasi bencana Covid-19 juga dilakukan pemerintah melalui anjuran *stay at home* bagi masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Namun kebijakan mitigasi bencana ini sejak awal bahkan hingga kini masih seringkali dinilai merampas kebiasaan-kebiasaan normal masyarakat. Berdasarkan perspektif analisis keberhasilan kebijakan, maka upaya-upaya pemerintah ini membutuhkan kesadaran publik yang berwujud dukungan.

Dalam implementasinya di Kota Samarinda, berikut ini tersaji data mengenai kepercayaan masyarakat Kota Samarinda terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemberian anjuran

kepada masyarakat untuk membiasakan diri tetap di rumah atau *stay at home* dalam penelitian ini:

**Grafik 5. Kepercayaan Masyarakat Kota Samarinda bahwa Penyebaran Covid-19 Dapat Dicegah dengan Kebiasaan *Stay at Home***



Sumber: Hasil kuesioner, 2021.

Pengumpulan data dari hasil survei menunjukkan bahwa 66,3 persen masyarakat Kota Samarinda mempercayai bahwa dengan penerapan *stay at home*, penyebaran Covid-19 dapat dicegah. Namun, 26,4 persen mulai meragukannya.

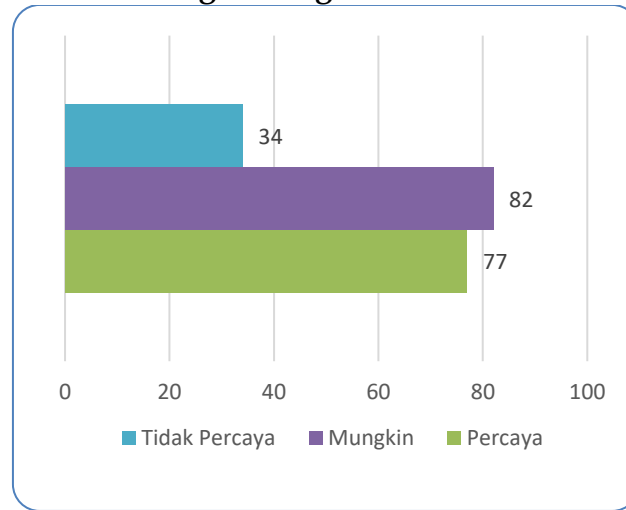
Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, selain penerapan kebijakan penegakan protokol kesehatan dan pemberian anjuran untuk *stay at home*, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai vaksinasi yang merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Vaksinasi diyakini pemerintah dapat menjadi salah satu kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga setiap

Pemerintah Daerah kemudian mengimplementasikan kebijakan vaksinasi di daerahnya masing-masing.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka kasus Covid-19 tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat, dimana dukungan itu akan muncul apabila masyarakat percaya bahwa vaksinasi mampu menanggulangi penyebaran Covid-19 di masyarakat. Sama halnya dengan keberhasilan mitigasi bencana dari penerimaan publik atas penerapan kebijakan penegakan protokol kesehatan dan *stay at home*.

Berikut ini tersaji data kepercayaan masyarakat Kota Samarinda terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah melalui program vaksinasi:

**Grafik 6. Kepercayaan Masyarakat Kota Samarinda bahwa Penyebaran Covid-19 Dapat Dicegah dengan Vaksinasi**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

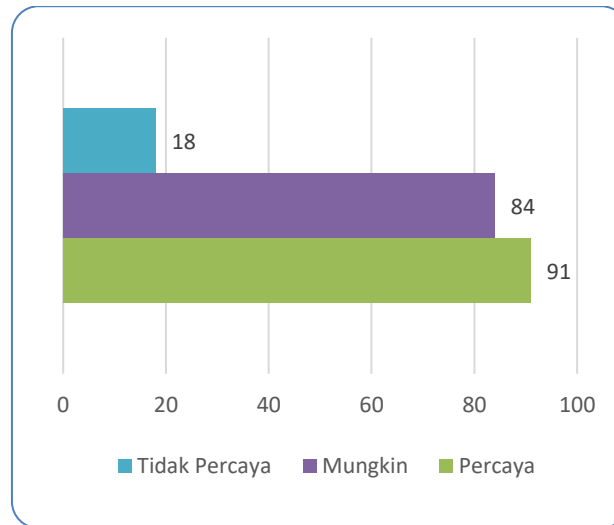
Pengumpulan data menunjukkan bahwa 42,5 persen masyarakat Kota Samarinda ragu-ragu untuk percaya bahwa vaksinasi dapat mencegah penyebaran Covid-19, sedangkan 39,9 persen percaya vaksinasi dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Seperti diketahui, kebijakan vaksinasi mengundang polemik dari berbagai kalangan yang kemudian bermuara pada beragamnya penerimaan publik atas program ini sebagai penanggulangan penyebaran Covid-19. Penerimaan publik atas vaksinasi sebagai upaya mitigasi bencana Covid-19 masih belum sepenuhnya sesuai harapan pemerintah. Walaupun selama ini pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meyakinkan publik melalui pengkomunikasian dengan melibatkan pakar kesehatan, tokoh agama bahkan publik figur. Selain juga telah

memberlakukan program vaksinasi itu dengan paksaan, yaitu mengkaitkannya dengan kebijakan lainnya. Misalnya dengan menjadikan surat keterangan vaksin sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengizinkan berjalannya kegiatan perekonomian di pasar-pasar tradisional dengan mensyaratkan pedagang harus telah divaksinasi. Hingga kini, pemerintah terus mempercepat program vaksinasi.

Kepercayaan masyarakat Kota Samarinda terhadap kesungguhan pemerintah daerah dalam melakukan upaya mitigasi bencana juga menjadi hal penting di dalam mencapai keberhasilan kebijakan. Data mengenai hal itu tersaji berikut ini:

**Grafik 7. Kepercayaan Masyarakat Kota Samarinda pada Kesungguhan Pemerintah dalam Melakukan Mitigasi Bencana Covid-19**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 47,2 persen masyarakat Kota Samarinda mempercayai bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah bersungguh-sungguh melakukan upaya mitigasi bencana Covid-19, sedangkan 43,5 persen ragu-ragu bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya dengan sungguh-sungguh.

Kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah publik merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi diperolehnya dukungan publik pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejalan dengan pendapat Schade dan Schlag (2001) bahwa penerimaan publik hanya dapat diharapkan jika seseorang memiliki kepercayaan terhadap efektivitas dari penggunaan suatu sistem. Sehingga kepercayaan publik pada kesungguhan pemerintah dalam penanganan masalah merupakan hal penting.

Terkait dengan hal tersebut, secara umum memang dilaporkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 bahwa

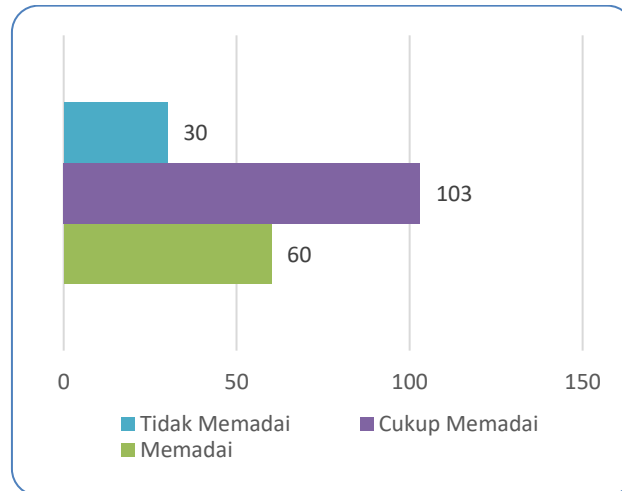
perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Kalimantan Timur pada Agustus 2021 berhasil mengalami penurunan dimana jumlah pasien turun di bawah seribu kasus (Kartono, 2021 dalam <https://kaltim.tribunnews.com>).

Persentase penurunan kasus di Kalimantan Timur tercatat sudah mencapai 19,82 persen. Khusus Kota Samarinda, dilaporkan penurunan kasus Covid-19 sejalan dengan penurunan tingkat kematian. Kasus kesembuhan terus meningkat dan infeksi terluar juga mulai menurun (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda, 2021).

Selanjutnya, peneliti juga melihat bahwa kepercayaan terhadap kesungguhan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana, berkaitan dengan penilaian masyarakat Kota Samarinda terkait penyediaan fasilitas kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat di masa

pandemi Covid-19 yang datanya menunjukkan bahwa:

**Grafik 8. Penilaian Masyarakat Kota Samarinda tentang Memadainya Fasilitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat di Masa Pandemi**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa fasilitas layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19 dinilai cukup memadai oleh masyarakat Kota Samarinda (53,4 persen).

Sebagaimana dikatakan oleh Schade dan Schlag (2001) bahwa penerimaan publik hanya dapat terbentuk dari adanya kepercayaan. Satu prasyarat untuk mendukung kepercayaan diri adalah tanggungjawab yaitu siapa yang akan bertanggungjawab atas berfungsinya sistem, termasuk atas kegagalan dan efek yang diinginkan. Maka dari itu, dalam mengatasi pandemi Covid-19, tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu tuntutan dan pengharapan utama dari publik.

Pandemi Covid-19 pada setiap negara merupakan kedaruratan yang bersifat kompleks. Tidak lagi sekedar menghadapi keterbatasan sumberdaya pada waktu

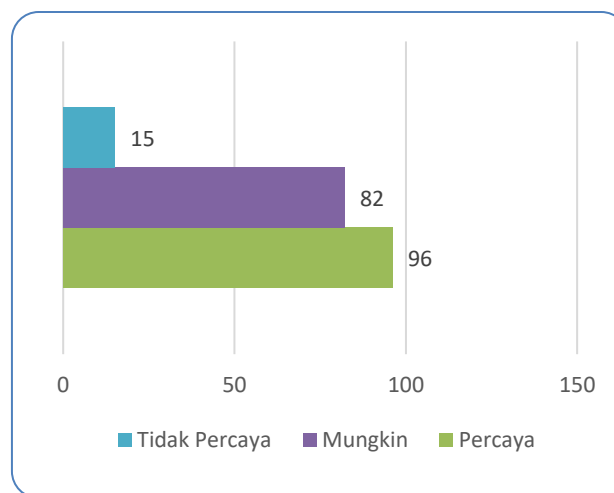
menangani situasi saat terjadinya bencana, tetapi juga pada saat panjangnya periode peristiwa bencana sehingga memunculkan kewalahan bagi pemerintah daerah. Tidak lagi hanya sekedar penyediaan berbagai sumberdaya yang terkait dengan kesehatan, tetapi juga terkait dengan sumberdaya untuk bidang kehidupan yang lainnya.

Maka selain penyediaan fasilitas layanan kesehatan, sumber-sumber ataupun saluran-saluran informasi yang jelas dan terpercaya menjadi kebutuhan publik di saat menjalani masa pandemi. Schade dan Schlag (2001) menyatakan prasyarat lain untuk mendukung terbentuknya kepercayaan diri agar terjadi penerimaan publik selain tanggungjawab ialah transparansi. Dalam hubungannya dengan transparansi, komitmen seseorang terhadap ide-ide (hal-hal) baru tergantung pada

komunikasi yang kredibel dan pengalaman-pengalaman positif pada keyakinan bahwa hal itu merupakan solusi yang efektif yang dapat dirasakan. Jadi, terdapat hubungan antara partisipasi, komitmen, akseptabilitas dan efektivitas. Ini menunjukkan pentingnya informasi yang baik dalam menimbulkan partisipasi masyarakat.

Berikut ini data mengenai kepercayaan masyarakat Kota Samarinda terhadap pemberitaan-pemberitaan mengenai Covid-19 yang bersumber dari pemerintah:

**Grafik 9. Kepercayaan Masyarakat Kota Samarinda terhadap Pemberitaan Covid-19 dari Pemerintah**



Sumber: Hasil kuesioner, 2021.

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 49,7 persen masyarakat Kota Samarinda mempercayai pemberitaan tentang Covid-19 yang berasal dari pemerintah, sedangkan 42,5 persen menyatakan keraguan terhadap pemberitaan tentang Covid-19 dari pemerintah.

Pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan besar dalam menangani Covid-19, tetapi juga menghadapi hambatan lain berupa maraknya berita palsu / tidak benar (*hoax*) mengenai Covid-19. Riset Nurhanisah (2021) menunjukkan bahwa per 20 April 2020, jumlah *hoax* yang beredar di media sosial sangat tinggi, dengan perincian: 861 kasus di *Facebook*, 352 kasus di *Twitter*, 10

kasus di *Instagram*, 8 kasus di *Youtube*. Maraknya *hoax* di tengah masyarakat dapat memperparah situasi pandemi itu sendiri. Sehingga upaya-upaya pemerintah untuk menangani penyebaran *hoax* terutama pada *platform* digital juga mendesak diperlukan.

Mengenai faktor informasi, Steg dan Vlek (1997) menyatakan bahwa terbatasnya informasi dapat memiliki efek negatif sedemikian rupa. Kekurangan informasi dapat menyebabkan penerimaan yang rendah terhadap nilai-nilai kebijakan secara signifikan. Dengan demikian, untuk mitigasi bencana Covid-19 dibutuhkan penyampaian informasi yang memadai bagi masyarakat oleh



pemerintah. Sebab berdasarkan struktur isu akseptabilitas yang dikemukakan Schlag dan Teubel (1997), informasi merupakan salah satu faktor munculnya penerimaan publik yang mengarah pada dukungan terhadap implementasi kebijakan.

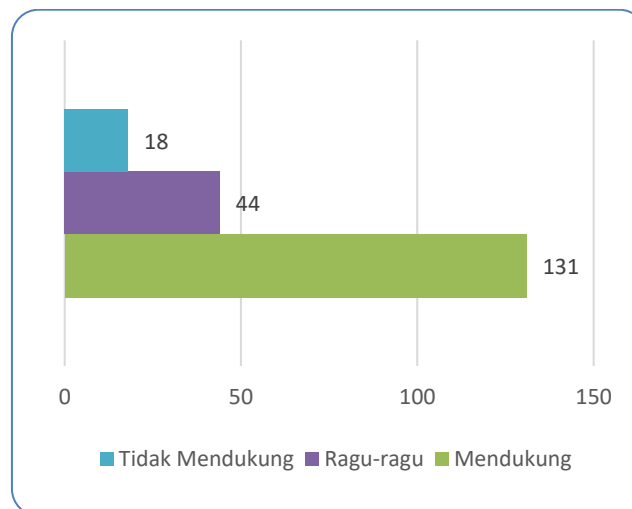
### 3. Komitmen Publik Kota Samarinda pada Keberlanjutan Kebijakan Mitigasi Bencana Covid-19

Mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mencakup dapat berlanjut atau

tidak, tentu tidak terlepas dari dukungan publik. Maka dari itu, penelitian ini menghimpun pemikiran publik mengenai beberapa kebijakan mitigasi bencana yang telah dirasakan dan dijalani selama ini.

Data pertama yang disajikan dari hasil survei mengenai dukungan masyarakat Kota Samarinda pada dilanjutkannya implementasi kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yaitu pada penerapan kebijakan protokol Kesehatan. Grafik 10 menunjukkan pengumpulan data mengenai hal tersebut:

**Grafik 10. Dukungan Masyarakat Kota Samarinda pada Dilanjutkannya Implementasi Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 67,9 persen masyarakat Kota Samarinda mendukung upaya mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda melalui implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan.

Sejumlah laporan perkembangan kasus Covid-19 yang berasal dari Dinas Kesehatan maupun dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan bahwa penurunan

kasus Covid-19 terjadi akibat kepatuhan masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan dalam aktivitasnya sehari-hari. Bahkan setelah hampir dua tahun pandemi Covid-19 melanda, masyarakat telah terbiasa untuk melakukannya. Adaptabilitas publik untuk mencegah penyebaran Covid-19 pun menjadi kebiasaan baru yang turut memberi sumbangsih dalam perlawanan terhadap virus ini. Pada tahap inilah kemudian

komitmen publik dibutuhkan untuk menciptakan keberhasilan mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan terbentuknya akseptabilitas.

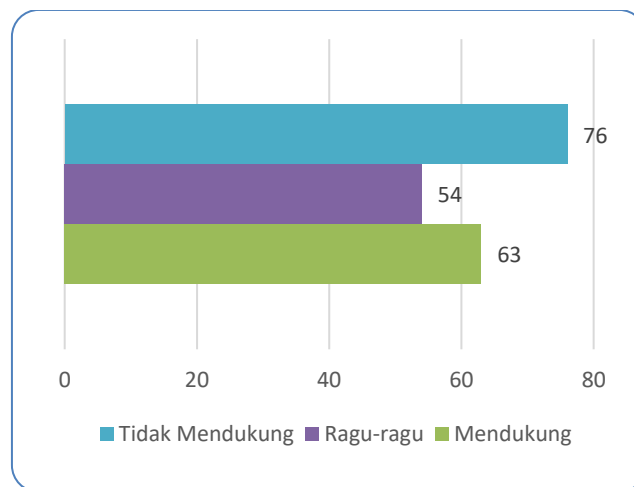
Penelitian ini selanjutnya juga menghimpun data mengenai dukungan masyarakat Kota Samarinda pada dilanjutkannya implementasi kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yaitu pada penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Secara nasional, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai PSBB sejak April 2020 yang merujuk pada Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Untuk mendukung implementasinya, pemerintah menerbitkan

dan memberlakukan dua kebijakan turunan yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 serta Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Maka Pemerintah Daerah pun memberlakukan kebijakan PSBB di daerahnya masing-masing.

Untuk kondisi di Kota Samarinda, dukungan masyarakat Kota Samarinda pada dilanjutkannya implementasi kebijakan PSBB untuk mitigasi bencana Covid-19 sebagaimana terhimpun dari survei yang telah dilakukan tampak pada grafik 11:

**Grafik 11. Dukungan Masyarakat Kota Samarinda pada Dilanjutkannya Implementasi Kebijakan PSBB**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 39,4 persen masyarakat Kota Samarinda tidak mendukung upaya mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda melalui pemberlakuan kebijakan PSBB, sedangkan

32,6 persen mendukung dilanjutkannya kebijakan PSBB untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Adapun kebijakan PSBB dilakukan dengan adanya pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum, termasuk

sekolah dan bangunan keagamaan. Maka dari itu, di Kota Samarinda kebijakan PSBB tidak didukung oleh masyarakat untuk terus dilanjutkan implementasinya walaupun dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mitigasi bencana Covid-19. Penerapan kebijakan PSBB dianggap masyarakat sangat membatasi ruang gerak untuk memperoleh kebutuhan pendidikan, agama hingga perekonomian.

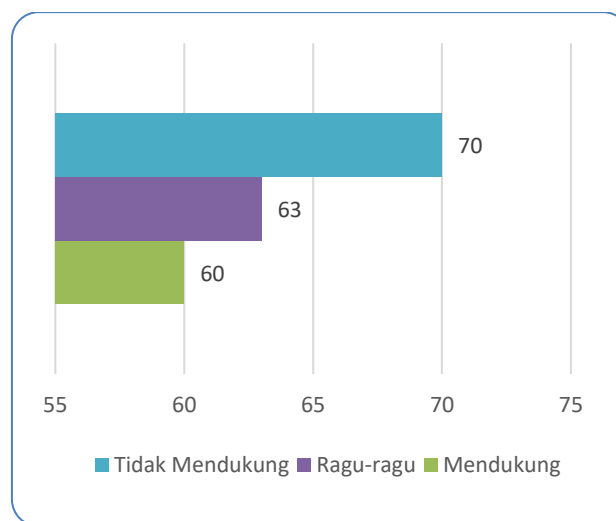
Selain melakukan kebijakan PSBB, pemerintah juga melakukan upaya mitigasi bencana Covid-19 dengan menerbitkan dan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 sejak akhir Juli 2021.

Untuk wilayah Kalimantan Timur, pelaksanaan kebijakan PPKM menggunakan dua regulasi turunan yang

tertuang di dalam Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur tentang PPKM level 4 untuk delapan daerah dan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur tentang PPKM level 3 untuk dua daerah, yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kota Samarinda merupakan satu dari delapan daerah di Kalimantan Timur yang diinstruksikan harus menjalani PPKM level 4. Setelah menjalani PPKM level 4, maka peneliti menghimpun jawaban responden mengenai dukungan masyarakat Kota Samarinda pada dilanjutkannya implementasi kebijakan PPKM oleh pemerintah untuk mitigasi bencana Covid-19 dengan hasil sebagai berikut:

**Grafik 12. Dukungan Masyarakat Kota Samarinda pada Dilanjutkannya Implementasi Kebijakan PPKM**



*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 36,3 persen masyarakat Kota Samarinda tidak mendukung upaya mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda jika berupa kebijakan PPKM, sedangkan 32,6 persen

ragu-ragu mendukung dilanjutkannya kebijakan PPKM untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

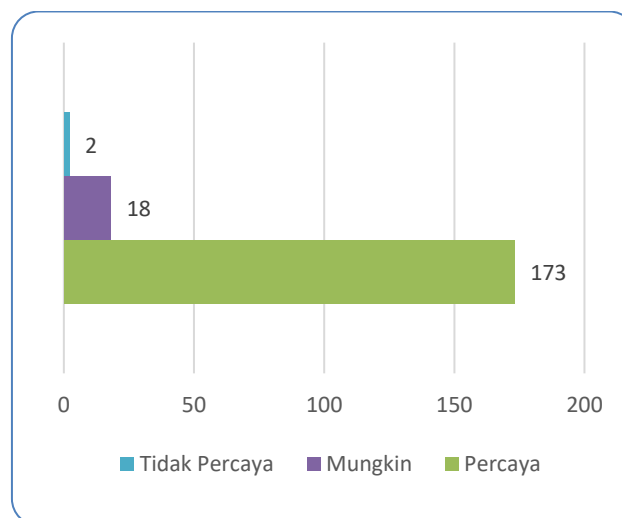
Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada Agustus 2021,

dilaporkan bahwa hasil penerapan PPKM level 4 menunjukkan korelasi kuat antara mobilitas masyarakat dengan perkembangan jumlah kasus konfirmasi dan kasus aktif. Semakin besar penurunan mobilitas indeks komposit, semakin besar pula penurunan jumlah kasus. Jika mobilitas masyarakat dapat ditekan, maka semakin besar kecenderungan terjadinya penurunan jumlah kasus. Untuk daerah di Pulau Kalimantan, berdasarkan *Google Mobility Index* dari 13 Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM level 4, diketahui penurunan mobilitas terbesar terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar -35,2 persen. Sementara penurunan mobilitas yang rendah antara -15 hingga -17,6 persen terjadi di daerah Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Palangkaraya, Kota Banjarbaru, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur (<https://www.ekon.go.id/publikasi>).

Lebih lanjut diperincikan dalam laporan tersebut bahwa secara umum perkembangan kasus aktif di Kalimantan selama Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar -1,69 persen dimana tiga provinsi mengalami penurunan. Tetapi dua provinsi mengalami kenaikan yang cukup tinggi antara lain Kalimantan Selatan sebesar 34,27 persen dan Kalimantan Utara sebesar 26,66 persen. Pada tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 7 dari 13 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan kasus aktif dimana 6 diantaranya adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepercayaan masyarakat Kota Samarinda pada diperlukannya kerjasama antar pihak dalam penanggulangan Covid-19 ditunjukkan oleh sajian data berikut ini:

**Grafik 13. Kepercayaan Masyarakat Kota Samarinda pada Diperlukannya Kerjasama Antar Pihak dalam Penanggulangan Covid-19**



Sumber: Hasil kuesioner, 2021.

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 89,6 persen masyarakat Kota

Samarinda mempercayai bahwa keberhasilan penanggulangan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang baik

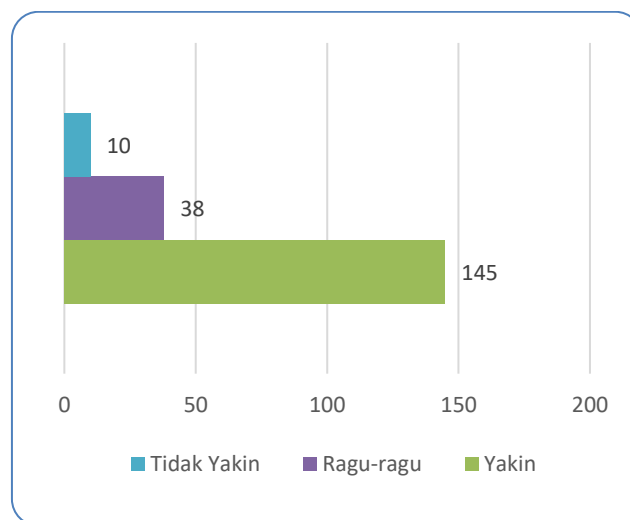
antara pemerintah, swasta, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bly dkk (2020) bahwa bencana membutuhkan penanganan yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi dan kerjasama tim. Sehingga dalam hal ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi kebutuhan dalam penanganan masalah publik. *Collaborative governance* mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, yang di dalamnya terkandung pengambilan keputusan dan tata kelola kolaboratif, dimana para mitra

saling menghasilkan tujuan dan strategi kemudian berbagi tanggungjawab dan sumberdaya (Davies dan White, 2012).

Namun demikian, pertanyaan pamungkas yang tidak kalah penting bagi keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya mitigasi bencana bagi masyarakat terletak pada keyakinan publik bahwa masalah tersebut akan mampu diatasi. Berikut ini tersaji data mengenai keyakinan masyarakat Kota Samarinda tentang berakhir tidaknya masa pandemi Covid-19:

**Grafik 14. Keyakinan Masyarakat Kota Samarinda bahwa Covid-19 Akan Berakhir**

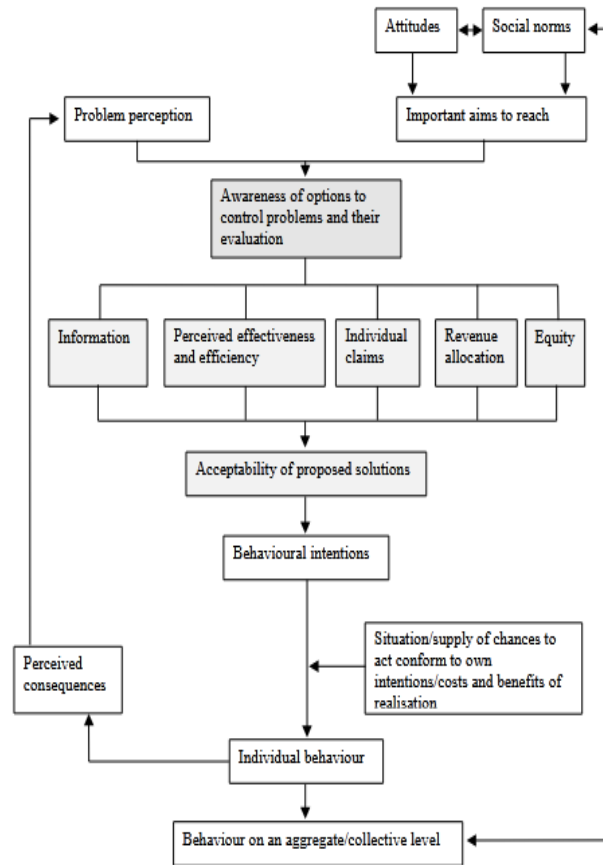


*Sumber: Hasil kuesioner, 2021.*

Pengumpulan data menunjukkan bahwa 75,1 persen masyarakat Kota Samarinda yakin bahwa pandemi Covid-19 akan dapat berakhir. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Samarinda memiliki optimisme yang baik dalam melawan pandemi Covid-19, diantaranya melalui penerimaan yang baik atas kebijakan-kebijakan mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerimaan publik terhadap keberhasilan kebijakan terbentuk dari adanya unsur persepsi, kepercayaan (*trust*) dan komitmen. Schade dan Teubel (1997) menggambarkan struktur isu akseptabilitas atau penerimaan publik sebagaimana tampak pada gambar berikut ini:

**Gambar 14. Struktur Isu Akseptabilitas**



Sumber: Schlag dan Teubel (1997)

Memperhatikan struktur isu akseptabilitas di atas, dapat diuraikan bahwa persepsi individu terhadap masalah menghasilkan kesadaran memilih untuk mengontrol masalah dan melakukan evaluasi. Dimana kesadaran itu dipengaruhi oleh faktor informasi, efektivitas dan efisiensi yang dirasakan, klaim individu, alokasi nilai dan keadilan. Hal-hal itulah yang kemudian akan memunculkan penerimaan atau akseptabilitas terhadap solusi yang ditawarkan, yang pada kondisi berikutnya akan mempengaruhi niat berperilaku yang kemudian akan tertuang dalam perilaku individu, lalu pada perilaku kelompok.

Mengenai faktor informasi, Steg dan Vlek (1997) menyatakan terbatasnya atau

kurangnya informasi dapat menyebabkan penerimaan yang rendah terhadap nilai-nilai kebijakan secara signifikan. Schade dan Schlag (2001) mengemukakan dari sudut pandang psikologis, tingkat pengetahuan yang relevan memiliki fungsi pada sikap terhadap obyek tertentu. Dibandingkan dengan orang yang tidak tahu, maka orang yang berpengetahuan lebih sadar akan keuntungan dan kelemahan dari suatu kebijakan. Mereka sadar akan masalah yang terakit dengannya dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh masalah itu. Dalam hal ini, seseorang setidaknya dapat mengontrol sendiri konsekuensi dari hal-hal yang sebenarnya di luar kendali mereka.

Mengenai faktor efektivitas dan efisiensi yang dirasakan, Schade dan Schlag (2001) menyatakan jika seseorang telah menyadari masalah dan konsekuensinya, dan telah mengidentifikasi setidaknya sebagian tujuan dari perubahan yang terjadi, maka mereka akan terbawa pada pertanyaan “apakah tindakan yang dilakukan (melalui kebijakan) telah efektif dan efisien?” Efektivitas mengacu pada derajat pencapaian tujuan dari tindakan yang dilakukan. Efisiensi di sisi lain berarti hubungan biaya-manfaat dari ukuran konkrit. Karena kriteria efisiensi sulit untuk diselidiki, hingga kini sebagian besar orang akan berpatokan pada efektivitas yang dirasakan (Keränen dkk, 1999; Steg dan Vlek, 1997). Bila penilaian terhadap efektivitas yang dirasakan bernilai rendah, biasanya akan sejalan dengan akseptabilitas yang lebih rendah pula, begitu pun sebaliknya (Schade dan Schlag, 2001).

Selanjutnya mengenai faktor keadilan, Schade dan Schlag (2001) menyatakan dari sudut pandang psikologis, keadilan yang dirasakan adalah perhatian utama sebagai persyaratan dasar untuk munculnya penerimaan terhadap sesuatu.

Maka temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Degelling dkk (2018) yang menyatakan bahwa penerimaan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang tertuang di dalam kebijakan-kebijakannya serta pelaksanaannya secara efektif.

## 5. PENUTUP

Penerimaan publik terhadap kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang diberlakukan Pemerintah Kota Samarinda mencakup persepsi yang meyakini Covid-19 sebagai masalah yang membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, adanya rasa percaya kepada upaya-upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dan timbulnya komitmen untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dipercaya mampu mengatasi Covid-19, walaupun harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta mitra lainnya.

Penerimaan publik tersebut memberikan dampak terhadap keberhasilan mitigasi bencana non alam seperti kasus Covid-19 ini, sebab keberhasilan kebijakan tersebut tidak selalu bergantung pada upaya lintas sektoral antara pemerintah dan swasta saja, tetapi juga sangat bergantung pada penerimaan publik. Walaupun keragaman karakteristik masyarakat menjadi tantangan dalam pelaksanaan manajemen bencana, namun ketika persepsi dan kepercayaan (*trust*) positif telah terbentuk, maka komitmen untuk mendukung implementasi kebijakan berpeluang membawa pada keberhasilan.

Temuan ini semakin memperkuat penelitian terdahulu (Cairney, 2009; Smith, 2013; Freudenberg, 2014; Cullerton dkk, 2016; Roache dan Gostin, 2018) bahwa penerimaan publik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Samarinda memperoleh dukungan masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi bencana Covid-19.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Arya. (2021). *Menjaga Ketahanan Negara terhadap Bencana Melalui Disaster Risk Management*. Center for Risk Management & Sustainability/CRMS. Diakses dari <https://crmsindonesia.org/publications> pada 26 Agustus 2021.
- Bly, J., Francescutti, L.H. & Weiss, D. (2020). *Disaster Management: A State of the Art Review*. Diakses dari <https://www.intechopen.com/chapters/74029> pada 25 Agustus 2021. doi: 10.5772/intechopen.94489.
- Cairney, P. (2009). The role of ideas in policy transfer: the case of UK smoking bans since devolution. *Journal of European Public Policy*, 16(3), 471–488. Diakses dari <https://doi.org/10.1080/13501760802684718>.
- Cullerton, K., Donnet, T., Lee, A. & Gallegos, D. (2016). Playing the policy game: a review of the barriers to and enablers of nutrition policy change. *Public Health Nutrition*, 19(14), 2643–2653. Diakses dari <https://doi.org/10.1017/S1368980016000677>.
- Davies, Althea L. dan Rehema M. White. (2012). 'Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland', *Journal of Environmental Management*, 112, 160–169. Diakses dari: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.07.032>.
- Degelling, C. et al. (2018). 'Assessing the public acceptability of purposed interventions to reduce the misuse of antibiotic in Australia: a report on two community juries', *Health Expect Journal*. Sydney. doi: 10.1111/hex.12589.
- Freudenberg, N. (2014). *Lethal but Legal: Corporations, Consumption, and Protecting*. New York: Oxford University Press.
- Health Standards Organization. (2020). *Emergency and Disaster Management (Guideline)*. Public Health. New York: Oxford University Press. Diakses dari [www.healthstandards.org](http://www.healthstandards.org) pada 25 Agustus 2021.
- Hufschmidt, G. (2011). A comparative analysis of several vulnerability concepts. *Natural Hazard*, 58, 621–643. doi: <https://doi.org/10.1007/s11069-011-9823-7>.
- Kartono, J.P. (2021, August 18). Update Covid-19 Kaltim, jumlah kasus turun di bawah seribu kasus. *Kaltim Tribunnews*. Retrieved from <https://kaltim.tribunnews.com/2021/08/18/update-covid-19-kaltim-rabu-18-agustus-2021-jumlah-pasien-turun-di-bawah-seribu-kasus>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2021). *Evaluasi Penerapan PPKM Level 4 di Wilayah Kalimantan, Respon Cepat Kendalikan Laju Kasus Covid-19*. Siaran pers



- HM.4.6/211/SET.M.EKON.3/08/2021. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3211/evaluasi-penerapan-ppkm-level-4-di-wilayah-kalimantan-respon-cepat-kendalikan-laju-kasus-covid-19>.
- Keränen, M., Schade, J., Schlag, B. & Vougioukas, M. (1999). *Public Acceptability*. Helsinki, Dresden, London: Trans Price Deliverable 6, Report to EC, DG VII.
- Kollek, D. (editor). (2013). *Disaster Preparedness for Health Care Facilities*. PMPH-USA.
- Kusumasari, B. & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: the role of local government capability and the management of natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural Hazard*, 60(2), 761-779.
- La, Viet-Phuong, et al. (2020). Policy response, social media and science journalism for the sustainability of the public health system amid the Covid-19 outbreak: the Vietnam lessons. *Sustainability*, 12, 2391, 1-27. Diakses dari <https://doi.org/10.3390/su12072931>
- Nurhanisah, Y & Syaifullah, A. (2021, January). Stop sebar hoaks Covid-19! *Indonesiabaik.id*. Retrieved from <https://indonesiabaik.id/infografis/setop-sebar-hoaks-covid-19>.
- Oliver, C. (2010). *Catastrophic Disaster Planning and Response*. First Edition. CRC Press.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda. (2021). *Tren Kasus Covid-19 Menurun, Pemkot Samarinda Pertimbangkan Beri Kelonggaran Secara Bertahap*. Retrieved from <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kesehatan/tren-kasus-covid-19-menurun-pemkot-samarinda-pertimbangkan-beri-kelonggaran-secara-bertahap>.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Press Release 31 Juli 2021*. Retrieved from <https://covid19.kaltimprov.go.id/press-release>, file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/PR%20501%20tanggal%2031%20Juli%202021%20pukul%2015.00.pdf.
- Potutan, G. & Arakida, M. (2021). Evolving Disaster Response Practices during Covid-19 Pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6): 3137. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8002954> pada 25 Agustus 2021.
- Puspa, A. (2021, January 30). Komunikasi publik soal Covid-19 harus diperkuat. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/381229/komunikasi-publik-soal-covid-19-harus-diperkuat>.



- Quarantelli, E.L. (1988). Disaster Crisis Management: A Summary of Research Findings. *Journal of Management Studies*, 25(4): 373-385. doi: 10.1111/j.1467-6486.1988.tb00043.x.
- Rienstra, S.A., Rietveld, P. & Verhoef, E.T. (1999). The social support for policy measures in passenger transport: A statistical analysis for the Netherlands. *Transportation Research Part D*, 4, 181-200.
- Roache, S.A. & Gostin, L.O. (2018). Tapping the power of soda taxes: a call for multidisciplinary research and broad-based advocacy coalitions—A response to the recent commentaries. *International Journal of Health Policy Management*, 7(7), 674–676. Diakses dari <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2018.30>.
- Rogers, R.W. (1983). Cognitive and Psychological Processes in Fear Appeals and Attitude Change: A Revised Theory of Protection Motivation. In J.T. Cacioppo & R.E. Petty (Eds.). *Social Psychophysiology: A Sourcebook*. New York: Guilford Press.
- Schade, J. & Schlag, B. (2001). *Acceptability of Urban Transport Pricing*. Helsinki: Government Institute for Economic Research.
- Schlag, B. & Teubel, U. (1997). Public Acceptability of Transport Pricing. *IATSS Research*, 21, 134-142.
- Sekhon, M., Cartwright, M & Francis, J.J. (2017). Acceptability of healthcare interventions: an overview of reviews and development of a theoretical framework. *BMC Health Services Research*. doi: 10.1186/s12913-017-2031-8.
- Smith, K. (2013). *Beyond Evidence Based Policy in Public Health: The Interplay of Ideas*. Springer.
- Steg, L. & Vlek, C. (1997). The Role of Problem Awareness in Willingness-to-Change Car-Use and in Evaluating Relevant Policy Measures. In T. Rothengatter & E.C. Vaya (Eds.). *Traffic and Transport Psychology*, (pp.465-475). Amsterdam: Pergamon.
- Steg, L., Dreijerink, L & Abrahamse, W. (2005). Factors influencing the acceptability of energy policies: a test of vbn theory. *Journal of Environmental Psychology*. doi: 10.1177/0013916503251466.
- Tierney, K.J. (2007). Business and Disasters: Vulnerability, Impacts and Recovery. In *Handbook of Sociology and Social Research*. Diakses dari [https://doi.org10.1007/978-0-387-32353-4\\_16](https://doi.org10.1007/978-0-387-32353-4_16) pada 26 Agustus 2021.
- United Nations – SPIDER. (2019). *Space Based Information for Disaster Management and Emergency Response*. Agustus 26, 2021, retrieved from <http://www.un-spider.org>.

Vlassenroot, S. et al. (2008). Measuring acceptance and acceptability of ITS theoretical background in the development of a unified concept. *10<sup>th</sup> TRAIL Congress and Knowledge Market*. TRAIL in Perspective. Delft: TRAIL Research School. Retrieved from [file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/Measuring\\_acceptance\\_and\\_acceptability\\_of\\_ITS\\_Theo.pdf](file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/Measuring_acceptance_and_acceptability_of_ITS_Theo.pdf).

